

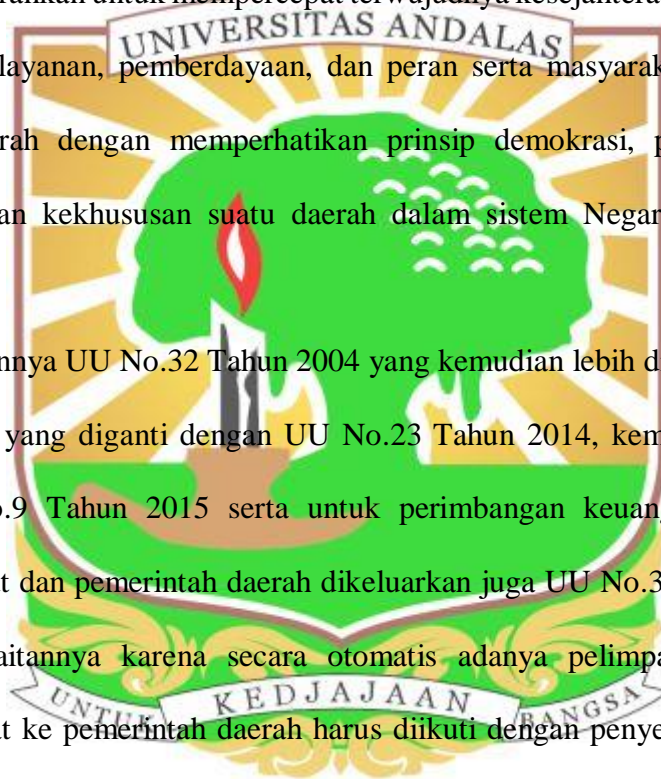
# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah yang diganti dengan UU No.23 Tahun 2014, kemudian disempurnakan dengan UU No.9 Tahun 2015 serta untuk perimbangan keuangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikeluarkan juga UU No.33 Tahun 2004. Kedua UU ini erat kaitannya karena secara otomatis adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan pemerintah pusat untuk dapat mengolah keuangan di masing-masing daerah. Dalam UU No.33 Tahun 2004 menyatakan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan instansi vertikal perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan.



Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut Sumenge (2012) organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (2014) menyimpulkan bahwa masih rendahnya kualitas belanja daerah dan APBD yang tergambar dari porsi belanja tidak langsung yang selalu lebih besar dari belanja langsung serta rendahnya penyerapan belanja daerah. Dengan kata lain, efisiensi belanja pemerintah daerah masih sangat rendah dimana alokasi belanja langsung yang elemen utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik lebih kecil daripada belanja tidak langsung yang sesungguhnya merupakan elemen pendukung. Ibaratnya dalam perusahaan, biaya overhead lebih besar dari pada biaya material dan tenaga kerja langsung. Lebih lanjut, permasalahan juga terjadi pada efektivitas APBD dimana realisasi anggaran belanja langsung belum optimal jika dibandingkan dengan target realisasinya. Berdasarkan data realisasi LKPD Kota Padang pada tahun anggaran 2016, belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang sebesar Rp 2,35 triliun dan terealisasi sampai Desember 2016 Rp2,17 triliun atau 92,66 persen.



Berdasarkan data tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian untuk menganalisis laporan realisasi anggaran belanja langsung Pemerintah Kota Padang sehingga dapat diketahui apakah pengelolaan anggaran belanja langsung tersebut sudah efektif dan efisien. Oleh karena itu, penulis memberi judul tugas akhir ini “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Padang Tahun 2013-2016”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Padang berdasarkan Laporan Keuangan tahun anggaran 2013-2016 menggunakan analisis rasio efektivitas dan efisiensi?
2. Bagaimana perkembangan realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Padang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan kegiatan magang yaitu:

1. Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Padang berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2013-2016 menggunakan analisis rasio efektivitas dan efisiensi.
2. Untuk mengetahui perkembangan realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Padang tahun anggaran 2013-2016.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kegiatan perkuliahan serta memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang.

2. Bagi Pemerintah Kota Padang, hasil tugas akhir ini diharapkan dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terutama bagi perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan ke depannya.
3. Bagi pembaca, tugas akhir diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk tugas sejenis.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik atau angka-angka berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kota Padang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga secara berkala untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu.

### **1.5.2 Objek Penelitian**

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang yang beralamat di Jalan Prof. M.Yamin, SH No.70. Pengumpulan data penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang bagian Akuntansi dan Pelaporan.

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data tersebut langkah yang dilakukan penulis yaitu dengan mengolah data kuantitatif yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang bagian Akuntansi dan Pelaporan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum dan memudahkan pembaca untuk memahami pembahasan tugas akhir ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; metode penelitian; dan sistematika penulisan.

### **Bab II Landasan Teori**

Menjelaskan teori mengenai pengelolaan keuangan daerah; anggaran sektor publik; laporan realisasi anggaran; belanja daerah; dan efektivitas serta efisiensi belanja.

### **Bab III Gambaran Umum BPKAD Kota Padang**

Menjelaskan tentang profil Kota Padang; profil BPKAD Kota Padang yang berisi penjelasan mengenai sejarah BPKAD Kota Padang; kegiatan utama BPKAD Kota Padang, produk atau jasa yang ditawarkan serta visi dan misi BPKAD Kota Padang; dan struktur organisasi BPKAD Kota Padang.

### **Bab IV Pembahasan**

Menjelaskan pembahasan mengenai hasil analisis efektivitas; hasil analisis efisiensi anggaran belanja langsung; dan data perkembangan realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Padang;

### **Bab V Penutup**

Berisi kesimpulan secara keseluruhan mengenai pembahasan tugas akhir; dan saran untuk tugas akhir ini apabila ada kekurangan dan kesalahan.

